

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)**

Departemen Pertanian mengeluarkan kebijakan dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam bentuk program fasilitasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Program BLM ini diarahkan untuk memberdayakan masyarakat yang mencakup bantuan modal untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi produktif; bantuan sarana dan prasarana dasar yang mendukung kegiatan sosial ekonomi; bantuan pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung penguatan kegiatan sosial ekonomi; bantuan penguatan kelembagaan untuk mendukung pengembangan proses hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi secara berkelanjutan melalui penguatan kelompok masyarakat dan unit pengelola keuangan; dan bantuan pengembangan sistem pelaporan untuk mendukung pelestarian hasil-hasil kegiatan sosial ekonomi produktif (Sumodiningrat, 2000).

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan kebijakan pemerintah dalam mengalakan program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah memberikan bantuan modal untuk kegiatan usaha di bidang agribisnis yang sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran, selain itu nantinya juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pedoman Umum PUAP, 2008).

Menurut Pedoman Umum PUAP (2012), Program ini menyalurkan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) PUAP ke desa miskin terjangkau. Dana BLM-PUAP yang diterima masing-masing desa tersebut sebesar Rp 100 juta untuk mengembangkan agribisnis perdesaan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Tujuan program PUAP yaitu :

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah;

2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani;
3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Sasaran yang diharapkan dari program PUAP adalah :

1. Berkembangnya usaha agribisnis di desa terutama desa miskin terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa.
2. Berkembangnya Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi.
3. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani atau peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
4. Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan maupun musiman.

Operasional penyaluran dana PUAP tersebut dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gapoktan terpilih sebagai pelaksana PUAP dalam hal penyaluran dana penguatan modal kepada anggotanya. Fasilitasi bantuan sebagai penguatan modal usaha bagi petani anggota baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Pelaksanaan PUAP supaya lebih maksimal dalam pencapaian hasilnya, maka Gapoktan harus didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani (PMT). Gapoktan PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani (Pedoman Umum PUAP, 2008).

Mengantisipasi agar penyaluran dan pemanfaatan PUAP berjalan lancar, aman dan terkendali, maka dibentuk suatu tim pemantau, pembina dan pengendali oleh Tim Teknis di tingkat Pusat, Provinsi sampai Kabupaten/Kota. Pembinaan difokuskan terhadap peningkatan kualitas SDM yang menangani BLM-PUAP di tingkat kabupaten atau kota, koordinasi dan pengendalian, serta mengembangkan sistem pelaporan PUAP melalui pelatihan peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan PUAP di lapangan. Pelaksanaan pengendalian dari Tim pembina

PUAP Propinsi dan Tim teknis PUAP Kecamatan/Kota dengan melakukan cara pertemuan reguler dan kunjungan lapangan serta mendiskusikan permasalahan yang terjadi di lapangan (Pedoman Umum PUAP, 2010).

Pelaksanaan PUAP dilakukan melalui pendekatan dan strategi sebagai berikut : (1) Memberikan bantuan modal usaha kepada petani untuk membiayai usaha agribisnis dengan membuat usulan dalam bentuk RUA, RUK dan RUB; (2) Petani penerima manfaat program PUAP tersebut harus mengembalikan dana modal kepada Gapoktan sehingga dapat digulirkan lebih lanjut oleh Gapoktan melalui usaha simpan-pinjam (*tahun ke dua*); (3) Dana modal usaha yang sudah digulirkan melalui pola simpan-pinjam selanjutnya melalui keputusan seluruh anggota gapoktan diharapkan dapat ditumbuhkan menjadi LKM-A, dan pada akhirnya difasilitasi menjadi jejaring pembiayaan (*Linkages*) dari perbankan/lembaga keuangan (Juknis Peningkatan (Rating) Gapoktan PUAP Menuju LKM-A, 2010).

### **2.1.1. Indikator Pelaksanaan PUAP**

Menurut Pedoman Umum PUAP (2012), Indikator keberhasilan PUAP yaitu :

Indikator keberhasilan *output* meliputi :

1. Tersalurkannya BLM PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota Gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian; dan
2. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani.

Indikator Keberhasilan *outcome* PUAP antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga tani.
2. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani, dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha

3. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis di sektor (hulu, sektor budidaya, dan sektor hilir) di pedesaan, dan
4. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani, dan rumah tangga tani, dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah.

Sedangkan, indikator Keberhasilan *benefit* dan *impact* PUAP antara lain:

1. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP.
2. Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh Petani, dan
3. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di pedesaan.

### **2.1.2. Strategi PUAP**

Menurut Pedoman Umum PUAP (2012), Strategi PUAP yaitu :

Strategi dasar Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP
2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin yang terjangkau
3. Fasilitasi modal usaha bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin, dan
4. Penguatan kelembagaan Gapoktan, sebagai lembaga ekonomi ekonomu yang dikola dan dimiliki petani

Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui :
  - a. Pelatihan bagi petugas tim teknis Kecamatan, Kabupaten/Kota sebagai pendampingan dan pembina PUAP
  - b. Rekrutmen dan pelatihan bagi penyuluh dan PMT
  - c. Pelatihan bagi pengurus Gapoktan, dan
  - d. Pendampingan bagi petani oleh penyuluh dan PMT
2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin yang terjangkau dilaksanakan melalui :

- a. Identifikasi potensi desa
  - b. Penentuan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) unggulan
  - c. Penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan
3. Fasilitasi modal usaha bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin dilaksanakan melalui :
- a. Penyaluran dana BLM-PUAP kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan
  - b. Pembinaan teknis usaha agribisnis dan alih teknologi
  - c. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya
4. Penguatan kelembagaan Gapoktan dilaksanakan melalui :
- a. Pendampingan Gapoktan oleh penyuluh pendamping
  - b. Pendampingan Gapoktan oleh PMT di setiap Kabupaten/Kota
  - c. Fasilitasi peningkatan kapasitas Gapoktan menjadi lembaga ekonomi yang mempunyai unit-unit usaha dan dimiliki serta dikelola petani.

## **2.2. Lembaga Keuangan Mikro pada Pertanian berbasis Agribisnis**

Menurut definisi yang dipakai dalam *Microcredit Summit* (1997), dalam Wijono (2005), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah Kelembagaan usaha yang mengelola jasa keuangan untuk membiayai usaha skala mikro baik berbentuk formal maupun non formal yang diprakarsai oleh masyarakat atau pemerintah. Karena yang dituju adalah LKM bagi petani, maka usaha yang dimaksudkan juga usaha pertanian (Hendayana, 2010).

Pola LKM Pertanian untuk memudahkan pelayanan kepada nasabah (petani), maka pola yang dikembangkan adalah LKM yang memiliki karakteristik sebagai berikut : (1) Pola pelayanannya Pola LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (B3K), sehingga dapat bersifat sederhana, (2) Ada pinjaman kelompok tani; (3) Di samping melakukan pelayanan pinjaman pembiayaan juga menampung tabungan atau simpanan anggota kelompok; (4) Administrasi

dilakukan secara sederhana tetapi tetap memenuhi syarat akuntabilitas sebagai organisasi publik; (5) Untuk mendukung legalitas operasional, dibuatkan surat pengakuan berupa Surat Keputusan dari pemerintah Daerah setempat, sehingga ada jaminan hukumnya jelas (Hendayana, 2010).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Hendayana (2010), bahwa pola LKM seperti itu sejalan dengan kebijakan revitalisasi pertanian dan rencana strategis pembangunan pertanian yang mengarahkan upaya pengelolaan keuangan oleh Kelompok tani seiring dengan peningkatan kapasitas kelompok tani. Dengan demikian di masa mendatang kelompok tani fungsinya dikembangkan untuk menjadi lembaga keuangan mikro pertanian. LKM tersebut diharapkan mampu mengelola sumberdaya finansial untuk melayani kebutuhan petani di lingkungannya dalam upaya mengembangkan usaha ekonomi produktif di bidang pertanian.

### **2.3. Kinerja Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis**

Kelembagaan merupakan suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang dan lembaga untuk tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Kapasitas kelembagaan adalah bagaimana kemampuan kelembagaan untuk mencapai tujuan-tujuannya sendiri. Pencapaian tujuan kelembagaan dapat dilihat dari kinerja kelembagaan (Syahyuti, 2007). Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkan dari Gapoktan pelaksana PUAP dengan fungsi utamanya adalah untuk mengelola aset dasar dari dana PUAP dan dana keswadayaan anggota (Pedoman Umum PUAP, 2010).

Kinerja pengelolaan LKM-A pada gapoktan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui pola pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) di tingkat Gapoktan PUAP oleh pengurus. Sesuai dengan kaedah-kaedah pengelolaan keuangan, pencatatan keuangan bertujuan untuk: (a) Meningkatkan tata cara pengelolaan keuangan dan pelaksanaan teknis di lapangan; (b) Mengetahui tata cara penggunaan dana; (c) Dalam tahap awal dapat diketahui tingkat

efisiensi atau adanya penyimpangan dalam penggunaan dana; (d) Memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan kepada pihak eksternal terutama mempersiapkan Gapoktan masuk pada jaringan *Linkages* program dari bank/lembaga keuangan (e) Memudahkan badan/tim pengawas melakukan pemeriksaan dalam penggunaan uang organisasi (Juknis Pemeringkatan (Rating) Gapoktan PUAP Menuju LKM-A, 2010).

Pengukuran manajemen pengelolaan LKM-A dilakukan untuk beberapa pertimbangan yaitu : (1) Mengukur tingkat keberhasilan dari proses pendampingan terkait dengan pengelolaan keuangan. Proses pendampingan ini secara nyata ditunjukkan adanya peningkatan kemampuan pengurus gapoktan dalam mengelola keuangan. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan didasarkan pada AD/ART dan standar manajemen keuangan yang telah ditetapkan; (2) Mengukur proses pencatatan dan pelaporan keuangan, untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan (Syahyuti, 2007).

Menurut Pedoman Umum PUAP (2010), Prinsip-prinsip pengelolaan LKMA sebagai berikut :

- a. Modal LKMA haruslah bersumber dari anggotanya sendiri (swadaya), yang dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan pokok khusus atau modal penyertaan sebagai penguat modal dengan perlakuan sebagai investasi pada lembaga keuangan, selain itu LKMA juga dapat membuka berbagai jenis tabungan Simpanan sukarela.
- b. Agar anggota LKMA mempunyai rasa memiliki yang tinggi, anggota harus dimotivasi oleh pengurus gapoktan dan pengelola LKMA untuk mempunyai simpanan pokok khusus di LKMA
- c. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, tidak ada paksaan dan dapat menerima warga masyarakat dilingkungan secara selektif tanpa membedakan suku, jenis kelamin, agama dan kedudukan sosial.
- d. Layanan kredit/pinjaman/pembiayaan hanya diberikan kepada anggota LKMA saja, tidak boleh kepada bukan anggota.
- e. Mengembangkan pelayanan yang bermutu dan profesional, berorientasi pada bisnis dan social

- f. Dapat menghargai jasa, kemampuan dan produktivitas orang secara layak dan rasional
- g. Saling percaya. Setiap anggota harus mengembangkan sikap untuk dapat dipercaya, menepati janji dan dapat mempercayai orang lain.
- h. Kepemimpinan demokratis ditandai oleh : (i) setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama (ii) anggota berhak mengajukan usul yang harus diperhatikan oleh pengurus (iii) pengurus dan pengawas dipilih dari dan oleh anggota didalam rapat anggota pendiri (iv) manajemen diselenggarakan secara terbuka. Setiap anggota berhak mengetahui dan memperoleh informasi keuangan secara berkala.
- i. Berusaha untuk mencapai skala ekonomi atau volume usaha layak yang menjamin perolehan pendapatan, untuk membiayai pelayanan professional kepada para anggota, pertumbuhan dan pelestarian.
- j. Mengalokasikan sumberdana yang diperoleh dari pendapatan untuk kegiatan pendidikan secara terus menerus bagi kemajuan anggota dan keluarganya.
- k. LKMA melakukan kegiatan pelayanan keuangan untuk mendukung usaha para anggotanya.
- l. Membangun jaringan kerjasama antar LKMA dan lembaga lain yang lebih luas atas dasar saling menghargai dan saling mengembangkan.
- m. Pembiayaan yang diberikan kepada anggota harus diikuti dengan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan.
- n. Jaminan barang boleh diterapkan, namun pertimbangan yang terbaik tetap atas dasar watak/karakter peminjam sendiri dan kelayakan usaha.

Sistem pelayanan LKMA kepada anggota yang dilakukan dengan beberapa prinsip sebagai berikut : (1) prinsip pelayanan syariah yaitu pelayanan anggota dengan menggunakan prinsip bagi hasil antar LKMA dengan pihak pengguna pembiayaan dan penyimpan dana antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Musyarakah), dan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah); (2) prinsip pelayanan konvensional yaitu pelayanan pemberian pinjaman dan penyediaan jasa-jasa terkait dengan kebutuhan anggota dengan menggunakan sistem bunga (Laporan Kegiatan PUAP di Jawa Tengah, 2011).

Menurut Hendayana (2010), Prinsip LKM Terdapat tujuh prinsip yang harus dijadikan acuan ketika akan membangun LKM pertanian, yaitu :

1. Memenuhi prinsip kebutuhan, artinya LKM pertanian hanya perlu ditumbuh kembangkan di lokasi potensial yang petaninya memerlukan dukungan fasilitasi permodalan, dan belum ada lembaga jasa pelayanan keuangan di lokasi itu. Dengan demikian LKM akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
2. Fleksibel, dalam arti LKM yang ditumbuh kembangkan harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat.
3. Bersifat partisipatif. Penumbuhan LKM harus melibatkan para petani di lingkungan setempat, sehingga selain dapat mengakomodasi aspirasi petani, pengembangan yang dibangun secara partisipatif akan mampu membangun rasa kepedulian dan kepemilikan serta proses melalui bekerja bersama.
4. Akomodatif. Dalam hal ini LKM harus mengedepankan pemenuhan kebutuhan nasabah. Persyaratan untuk akses ke LKM disusun sedemikian rupa sehingga bisa membuka peluang seluas-luasnya untuk menjangkau kebutuhan petani dengan kelengkapan persyaratan minimal yang dimiliki petani.
5. Penguatan. Artinya, meskipun pembentukan dan pengembangan LKM bertujuan menyediakan permodalan usahatani, namun jangan sampai menciptakan ketergantungan tetapi harus mampu mendorong terjadinya penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani.
6. Kemitraan. Dalam hal ini pembentukan dan pengembangan LKM dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), seperti penyedia sarana produksi, tokoh-tokoh masyarakat tani, dunia usaha, perguruan tinggi, dan instansi sektoral terkait dalam setiap kegiatan.
7. Keberlanjutan. Penekanan keberlanjutan adalah pada kemampuan organisasi LKM untuk tetap terus berjalan, meskipun sudah tidak ada campur tangan lembaga atau aparat pemerintah dan swasta yang mendukungnya. LKM harus berorientasi pada tujuh fungsional menuju ke arah.

#### **2.4. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)**

Berdasarkan PERMENTAN Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) menetapkan bahwa Gapoktan sebagai pelaksana PUAP merupakan penggabungan dari beberapa kelompok tani dalam satu kawasan desa. PERMENTAN Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007, bahwa Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang terdiri dari : Gapoktan yang merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP. Tujuan penggabungan kelompok menjadi Gapoktan dalam PERMENTAN Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 adalah bahwa pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) didefinisikan sebagai kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan terdiri atas kelompok tani yang ada dalam wilayah suatu wilayah administrasi desa (Pedoman Umum PUAP 2008). Menurut Syahyuti (2007), Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usahatani bagi anggotanya dan petani lainnya. Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian serta terhadap sumber informasi. Pada prinsipnya, lembaga Gapoktan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun diharapkan juga mampu menjalankan fungsi-fungsi lainnya serta memiliki peran penting terhadap pertanian

Menurut Pedoman Umum PUAP (2008), Persyaratan Gapoktan penerima bantuan modal usaha PUAP adalah antara lain: (1) Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis; (2) Mempunyai struktur kepengurusan yang aktif; dan

(3) Dimiliki dan dikelola oleh petani. Untuk kepentingan keberlanjutan program PUAP, maka Gapoktan berfungsi sebagai *executing* dalam penyaluran dana BLM-PUAP. Organisasi Gapoktan dikukuhkan oleh Bupati/ Walikota yang dipilih dalam Rapat Anggota dengan susunan sebagai berikut: ketua, sekretaris, bendahara, dan petani anggota. Sedangkan untuk komite pengarah susunannya yaitu: ketua, dan anggota, yang terdiri dari pemuka masyarakat, wakil poktan dan penyuluh pendamping yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Gapoktan dalam pelaksanaannya dan pengembangan agribisnis di perdesaan melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut : (1) kesatuan satu unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan harga); (2) penyedia saprotan dan menyalurkan kepada petani melalui kelompoknya; (3) penyediaan modal usaha dan melakukan penyaluran secara kredit/pinjaman kepada para petani; (4) melakukan proses pengolahan produk para anggota yang dapat meningkatkan nilai tambah; (5) menyelenggarakan perdanganan, memasarkan/menjual produk petani kepada pedagang/industry hilir (Laporan Kegiatan PUAP di Jawa Tengah, 2011),

#### **2.4.1. Kinerja Gapokatan**

Berdasarkan PERMENTAN Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007, bahwa Kriteria Gapoktan penerima bantuan UAP adalah antara lain: (1) Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis; (2) Mempunyai struktur kepengurusan yang aktif; dan (3) Dimiliki dan dikelola oleh petani. Untuk kepentingan keberlanjutan program PUAP, maka Gapoktan berfungsi sebagai *executing* dalam penyaluran dana BLM-PUAP. Selain itu Kinerja Gapoktan dapat dilihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART), dikarenakan anggaran dasar merupakan aturan dasar yang mengatur masalah-masalah vital yang harus ada pada awal organisasi tersebut terbentuk, seperti landasan organisasi, perangkat-perangkat organisasi, peran dan fungsi organisasi, tujuan organisasi dan keuangan organisasi. Intinya pada Anggaran dasar akan dikupas tuntas segala permasalahan terkait definisi dan hal-hal mendasar yang menjadi acuan dalam sebuah organisasi.

Sedangkan anggaran rumah tangga yaitu sebuah peraturan yang digunakan pada saat pelaksanaan lebih mengarah kepada teknis maupun tata cara pelaksanaan kegiatan dasar pada sebuah organisasi, seperti wewenang ketua, pembubaran, syarat-syarat keanggotaan, dan lain-lain.

Selayaknya suatu organisasi, Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) haruslah mempunyai catatan-catatan tertulis tentang segala aktivitas organisasi yang tertata rapi. Secara garis besar, jati diri dan aktivitas Gapoktan sudah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART). Fungsi AD/ART yaitu merupakan landasan kerja dan landasan gerak dalam mewujudkan visi dan misinya (Wijayanti, 2012). AD/ART merupakan undang-undang dasar dalam setiap organisasi. AD/ART memuat semua peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh suatu organisasi. AD/ART dibuat dan ditentukan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam organisasi tersebut.

#### **2.4.2. Kepengurusan Gapoktan**

Berdasarkan PERMENTAN Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007, bahwa pengurus Gapoktan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara adalah petani anggota yang dipilih dalam Rapat Anggota berdasarkan AD/ART. Untuk menjalankan fungsi organisasi PUAP, masing-masing Pengurus Gapoktan PUAP mempunyai tugas sebagai berikut :

##### **1. Ketua**

Mengkoordinasikan, mengorganisasikan serta bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan PUAP dengan rincian sebagai berikut :

1. Melaksanakan hasil keputusan rapat anggota;
2. Memimpin rapat pengurus yang dihadiri pengurus poktan, komite pengarah dan penyuluh pendamping;
3. Menanda tangani surat menyurat dan dokumen pelaksanaan PUAP (RUB) dan dokumen yang terkait dengan pencairan dana PUAP;
4. Mewakili Gapoktan dalam pertemuan dengan pihak lain

5. Mengkoordinasikan pelaporan dan pertanggung jawaban dana;
6. Memimpin organisasi dan administrasi Gapoktan PUAP.

## **2. Sekretaris**

Bertugas melaksanakan administrasi kegiatan Gapoktan PUAP, dengan rincian sebagai berikut :

1. Membuat dan memelihara notulen rapat, berita acara, serta dokumen PUAP lainnya.
2. Menyelenggarakan surat-menyurat dan pengarsipannya.
3. Menyelenggarakan administrasi dokumen RUB, RUK, RUA dan kegiatan organisasi lainnya.
4. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan kegiatan Gapoktan.

## **3. Bendahara**

Bertugas menangani seluruh kegiatan administrasi keuangan Gapoktan baik penyaluran maupun pengelolaan dana PUAP, dengan rincian tugas adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penarikan/pencairan sesuai dengan jadwal pemanfaatan oleh anggota;
2. Menyalurkan dana BLM PUAP sesuai dengan RUB, RUK dan RUA dan atau jadwal pemanfaatan dana yang diusulkan anggota;
3. Membukukan setiap penyaluran dana PUAP kepada anggota;
4. Menyimpan dan memelihara arsip pembukuan dana PUAP;
5. Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan keuangan Gapoktan PUAP

## **4. Komite pengarah**

Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil dari kelompok tani dan penyuluh pendamping. Komite Pengarah terdiri atas seorang ketua dan dua orang anggota dengan tugas sebagai berikut :

1. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam penetapan RUB pada saat Rapat Anggota;

2. Mengawasi penggunaan dana BLM-PUAP sesuai keputusan Rapat Anggota;
3. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam penumbuhan dan pengembangan unit usaha otonom Gapoktan.

#### **2.4.3. Indikator Gapoktan Kuat dan Mandiri**

Gapoktan Kuat dan Mandiri dicirikan antara lain dengan (1) adanya pertemuannya rapat anggota/pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan; (2) memiliki rencana kerja yang disusun bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif; (3) memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama; (4) memiliki pencatatan/pengadministrasi yang rapi; (5) memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama disektor hulu dan hilir; (6) memfasilitasi usahatani secara komersial dan berorientasi pasar; (7) sebagai sumber dan pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya; (8) memiliki jalinan kerjasama dengan Gapoktan lain pihak lainnya; (9) adanya pemupukan modal usaha baik berasal dari iuran anggota maupun dari usaha/kegiatan Gapoktan (Laporan Kegiatan PUAP di Jawa Tengah, 2011).

#### **2.5. Penilaian Gapoktan Berprestasi**

Mengukur kinerja suatu kelembagaan dapat dilakukan berbagai cara, antara lain dengan melakukan evaluasi secara ekonomi terhadap output dan dampak dari kelembagaan, menggunakan pendekatan evaluasi program, mempelajari kinerjanya melalui audit, serta menerapkan model pengukuran kinerjanya (Peterson *et al.*, 2003). Pengukuran manajemen pengelolaan LKM-A dilakukan untuk beberapa pertimbangan yaitu : (1) Mengukur tingkat keberhasilan dari proses pendampingan terkait dengan pengelolaan keuangan. Proses pendampingan ini secara nyata ditunjukkan adanya peningkatan kemampuan pengurus gapoktan dalam mengelola keuangan. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan didasarkan pada AD/ART dan standar manajemen keuangan yang telah

ditetapkan; (2) Mengukur proses pencatatan dan pelaporan keuangan, untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan (Juknis Pemingkatan (Rating) Gapoktan PUAP Menuju LKM-A, 2010).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan penghargaan bagi Gapoktan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha agribisnisnya sekaligus dapat mengelola dana PUAP melalui Lembaga Keuangan Mikro. Selain itu Gapoktan PUAP terdorong untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas fungsi-fungsi sebagai kelembagaan tani pelaksanaan PUAP. Penilaian ini dilakukan secara obyektif, transparan dan dapat bertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja Gapoktan yang dinilai. Aspek penilaian meliputi aspek administrasi, pengelolaan Gapoktan dan aspek usaha Gapoktan. Tahap awal penilaian adalah verifikasi kelengkapan dokumentasi administrasi Gapoktan yang diajukan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ke sekretariat PUAP Provinsi Jateng. Penjelasan mengenai indikator penilaian Gapoktan PUAP berprestasi, dapat dilihat pada **Lampiran 20** (Pedoman Penilaian Gapoktan PUAP Berprestasi, 2011).

## **2.6. Strategi**

Strategi adalah suatu penjabaran arah yang akan ditempuh oleh suatu organisasi dimasa depan. Strategi itu harus menyatakan bidang-bidang kegiatan yang akan dikembangkan oleh organisasi menuju unggul (Pumpin, 1996). Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan dan merupakan rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan strategi yang tepat oleh perusahaan (Jauch dan Glueck 1991). Strategi adalah keputusan yang pada dasarnya berbentuk rencana yang bersifat umum sebagai sebuah rencana. Strategi menggariskan arah, tujuan, program dan pola prioritas alokasi sumber daya (Porter, 1998).

Manajemen strategis memiliki cakupan proses manajemen yang lebih luas hingga pada tingkat yang lebih tepat dalam penentuan misi dan tujuan organisasi dalam konteks keberadaannya dalam lingkungan eksternal dan internalnya (Jauch dan Glueck 1991). Menurut David (2006) bahwa manajemen strategis adalah ilmu dan seni untuk memformulasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa manajemen strategis adalah sebuah proses manajemen atas fungsi keputusan-keputusan pada manajer yang menghubungkan tiga faktor kunci, yaitu lingkungan tempat perusahaan melakukan kegiatan, sumber daya yang dimiliki yang siap melayani serta harapan dan tujuan berbagi kelompok penunjang untuk kelangsungan hidupnya.

### **2.6.1. Konsep Manajemen Strategi**

Penerapan strategi harus dirancang sedemikian rupa sehingga organisasi dapat menampilkan keunggulan di bidang-bidang yang penting/strategis, maka akan dicapai keunggulan strategis (Pumpin, 1996). Perumusan strategi yang baik dapat membantu menyusun dan mengalokasikan sumber daya organisasi secara spesifik berdasarkan keunggulan dan kelemahan, antisipasi perubahan lingkungan dan gerakan lainnya (Porter, 1998). Menurut Pearce dan Robinson (1997), perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksud untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka penyediaan *customer value* terbaik. Beberapa langkah yang dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- 2) Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.

- 3) Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
- 4) Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
- 5) Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Istilah manajemen mengacu pada proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain (Robbins dan Coulter, 1999). Dijelaskan oleh Kotler (2002), bahwa manajemen strategis sebagai proses manajerial untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian yang layak antara sasaran dan sumber daya perusahaan dengan peluang pasar yang selalu berubah. Proses manajemen strategis dikatakan sebagai proses yang berkelanjutan dan berulang karena ini tidak akan berhenti selama perusahaan tersebut masih beroperasi. Membentuk siklus atau daur hidup yang selalu disesuaikan dengan perubahan zaman. Proses ini akan terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari tahap pertama menuju tahap berikutnya sampai tahap terakhir dan kemudian akan kembali lagi pada tahap pertama untuk menyusun kembali strategi selanjutnya yang lebih baik lagi bagi perusahaan. Menurut David (2006), manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap formulasi strategi, tahap implementasi strategi, dan tahap evaluasi strategi.

### **2.6.2. Strategi Pengembangan Sektor Agribisnis**

Pengembangan sektor agribisnis diperlukan beberapa langkah strategi yang bersifat umum dan spesifik. Strategi yang bersifat umum diantaranya: penentuan prioritas daerah atau wilayah dan komoditas yang harus dikembangkan; penentuan dan perencanaan secara rinci sejak produksi, penggunaan hasil, hingga pemasaran; serta penyediaan informasi tentang potensi daerah terutama

diperuntukkan bagi para investor. Strategi yang bersifat spesifik berupa pentingnya penyusunan strategi pengembangan agribisnis dalam kerangka konsep kemitraan dalam arti luas antara kegiatan produksi dengan pemasarannya serta berbagai faktor pendukung lainnya, yang direkat dengan legalitas hukum yang dinamis dan aplikatif (Darius, 2009). Strategi kebijaksanaan pembangunan perdesaan diarahkan kepada :

1. Pengembangan kelembagaan yang dapat mempercepat proses modernisasi perekonomian masyarakat perdesaan melalui pengembangan agribisnis, jaringan kerja produksi dan jaminan pemasaran.
2. Peningkatan investigasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang dapat mendorong produktivitas, kewiraswastaan dan ketahanan social masyarakat perdesaan.
3. Peningkatan ketersediaan pelayanan prasarana dan sarana perdesaan untuk mendukung proses produksi, pengolahan, pemasaran dan pelayanan social masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan lahan untuk menopang kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan secara berkelanjutan.
5. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah dan lembaga masyarakat perdesaan untuk mendukung pengembangan agribisnis dan pemberdayaan petani dan nelayan.
6. Penciptaan iklim social yang memberi kesempatan masyarakat perdesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, pengawasan, terhadap jalannya pemerintahan di perdesaan.

## **2.7. Proses Hierarki Analitik (*Analitycal Hierarchy Process/AHP*)**

*Analitycal Hierarchy Process* (AHP) merupakan suatu metode dalam analisis pengambilan keputusan yang menggunakan teknik pengambilan keputusan/optimasi multivariate, selain itu AHP merupakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. AHP pertama kali dikembangkan

oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburg, Amerika Serikat pada tahun 1970-an. AHP pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi diantara berbagai set alternatif. Analisis ini ditujukan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak mempunyai struktur, masalah yang memerlukan pendapat (*judgement*) Model pengambilan keputusan dengan AHP pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya. AHP juga memungkinkan struktur suatu sistem dan lingkungan kedalam komponen saling berinteraksi dan kemudian menyatukan mereka dengan mengukur dan mengatur dampak dari komponen kesalahan sistem (Saaty, 1993).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Saaty (1993), bahwa *Analytical Hierarchy Process* (AHP) menggunakan kerangka menyederhanakan dan mempercepat dalam proses pendukung pengambilan keputusan. Pada dasarnya AHP yaitu suatu metode dalam merinci suatu situasi yang kompleks, yang terstruktur kedalam komponen-komponennya. Analisis dilakukan secara AHP tersebut menggunakan pendekatan sistem, dimana pengambilan keputusan berusaha memahami suatu kondisi sistem dan melakukan prediksi dalam mengambil keputusan. Hal ini menekankan pada permasalahan dan solusinya yang merupakan suatu aktifitas pengaturan sistem yang saling berhubungan, sehingga dengan menggunakan pendekatan AHP dapat memecahkan suatu masalah dalam pengambilan keputusan.

Menurut Pendapat Bourgeois (2005), AHP umumnya digunakan dengan tujuan untuk menyusun prioritas dari berbagai alternatif/pilihan yang ada dan pilihan-pilihan bersifat kompleks dan multi kriteria. Secara umum, dengan menggunakan AHP, prioritas yang dihasilkan akan bersifat konsisten dengan berkaitan dengan transparansi dan partisipasi, AHP akan sangat cocok digunakan untuk penyusunan prioritas kebijakan publik yang menuntut transparansi dan partisipasi.

**Tabel 4.** Skala Banding Secara Berpasangan

<b>Tingkat Kepentingan</b>	<b>Definisi</b>	<b>Penjelasan</b>
1	Kedua elemen sama penting	Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lain	Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibanding elemen yang lain
5	Elemen yang satu lebih penting dari elemen lainnya	Pengalaman dan perjalanan sangat kuat mendukung satu elemen dibanding elemen yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya	Satu elemen dengan kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek
9	Satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen yang lainnya	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen memiliki tingkat pengesaan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan	
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibanding dengan aktiuvitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i	

Sumber : Saaty (1993).

Teknik AHP menyediakan prosedur yang sudah teruji keefektifannya dalam mengidentifikasi dan menentukan prioritas dalam pengambilan keputusan dan menentukan prioritas dalam pengambilan keputusan yang kompleks (Firdaus dan Farid, 2008). Menurut Saaty (1993), bahwa pendekatan AHP menggunakan skala mulai dari nilai bobot 1 sampai dengan 9. nilai bobot 1

menggambarkan “ sama penting”, ini berarti bahwa nilai atribut yang sama skalanya, nilai bobotnya 1, sedangkan nilai bobot 9 menggambarkan kasus atribut yang “penting absolut” dibandingkan dengan yang lainnya. Skala penilaian dapat dilihat pada **Tabel 4**.

Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan persoalan yang kompleks tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu hirarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel lain. Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami (Saaty, 1993), antara lain :

1. *Dekomposisi*, setelah mendefinisikan permasalahan atau persoalan yang akan dipecahkan, maka dilakukan dekomposisi, yaitu: memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika menginginkan hasil yang akurat, maka dilakukan pemecahan unsur-unsur tersebut sampai tidak dapat dipecah lagi, sehingga didapatkan beberapa tingkatan persoalan.
2. *Comparative Judgement*, yaitu membuat penilaian tentang kepentingan relatif diantara dua elemen pada suatu tingkatan tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen yang disajikan dalam bentuk matriks *Pairwise Comparison*.
3. *Synthesis of Priority*, yaitu melakukan sintesis prioritas dari setiap matriks *pairwise comparison* vektor *eigen* cirinya untuk mendapatkan prioritas lokal. Matriks *pairwise comparison* terdapat pada setiap tingkat, oleh karena itu untuk melakukan prioritas global harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal.
4. *Logical Consistency*, dapat memiliki dua makna, yaitu 1) obyek-obyek yang serupa dikelompokkan sesuai keseragaman dan relevansinya dan 2) tingkat hubungan antara obyek-obyek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

Menurut Saaty (1993), Penetapan prioritas kebijakan dilakukan dengan menangkap secara rasional persepsi orang, kemudian mengkonversi faktor-faktor yang intagible (yang tidak terukur) ke dalam aturan yang biasa, sehingga dapat dibandingkan. Adapun langkah-langkah dalam analisa data sebagai berikut:

1. Identifikasi sistem, yaitu untuk mengidentifikasi persoalan dan menentukan solusi yang diinginkan. Identifikasi sistem dilakukan dengan cara mempelajari referensi dan berdiskusi dengan para pakar yang memahami permasalahan, sehingga diperoleh konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
2. Menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi, persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi unsur-unsur, kemudian dilanjutkan dengan sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah.
3. Perbandingan berpasangan, menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Teknik perbandingan pasangan yang digunakan dalam AHP berdasarkan *judgement* atau pendapat dari para responden yang dianggap sebagai *key person*. Mereka dapat terdiri 1) pengambil keputusan 2) para pakar 3) orang yang terlibat, memahami dan merasakan permasalahan yang dihadapi.
4. Matriks pendapat individu formulasinya dapat disajikan sebagai berikut :

$$A = (a_{ij}) = \begin{array}{c|cccc} & C1 & C2 & \dots\dots & Cn \\ \hline C1 & 1 & a_{12} & \dots\dots & A_{1n} \\ C2 & 1/a_{12} & 1 & \dots\dots & A_{2n} \\ \dots\dots & \dots\dots & \dots\dots & \dots\dots & \dots\dots \\ Cn & 1/a_{1n} & 1/a_{2n} & \dots\dots & 1 \end{array}$$

Dalam hal ini  $C_1, C_2, \dots, C_n$  adalah set elemen pada satu tingkat dalam hirarki. Kuantifikasi pendapat dari hasil perbandingan berpasangan membentuk matriks  $n \times n$ . Nilai  $a_{i-j}$  merupakan nilai matriks pendapat hasil perbandingan yang mencerminkan nilai kepentingan  $C_i$  terhadap  $C_j$ .

5. Matriks pendapat gabungan, merupakan semua elemen berasal dari rata-rata geometrik elemen matriks pendapat individu yang nilai rasio inkonsistensinya memenuhi syarat.
6. Pengolahan horisontal, yaitu: a) perkalian baris; b) perkalian vektor prioritas atau vektor ciri (eigen vektor); c) perhitungan akar ciri (eigen value) maksimum dan d) perhitungan rasio inkonsistensi. Nilai pengukuran konsistensi diperlukan untuk menghitung konsistensi jawaban responden.
7. Pengolahan vertikal, digunakan untuk menyusun prioritas pengaruh setiap elemen pada tingkat hierarki keputusan tertentu terhadap sasaran utama.
8. Revisi pendapat, dapat dilakukan apabila nilai rasio inkonsistensi pendapat cukup tinggi ( $>0,1$ ). Beberapa ahli berpendapat jika jumlah revisi terlalu besar, sebaiknya responden tersebut dihilangkan. Jadi penggunaan revisi ini sangat terbatas mengingat akan terjadinya penyimpangan dari jawaban yang sebenarnya.

## 2.8. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/ Status Penelitian	Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Metodologi	Hasil Penelitian
M. Koko Prihartono	2009	Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Terhadap Kinerja Gapoktan dan Pendapatan Anggota Gapoktan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi</li> <li>• Kinerja Gapoktan</li> <li>• Pendapatan</li> <li>• kriteria efektivitas penyaluran (tunggakan, tingkat bunga dan jangkauan pinjaman)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• analisis pendapatan usahatani</li> <li>• perhitungan uji <i>t-statistik</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indikator organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Gapoktan</li> <li>• Pendapatan anggota Gapoktan setelah menerima BLM-PUAP mengalami peningkatan</li> <li>• tiga indikator kinerja Gapoktan yang memiliki pengaruh terhadap perubahan pendapatan anggota Gapoktan</li> </ul>
Ade Nurmarita Sari Elva NajmiAnniro (Program Kreativitas Mahasiswa)	2009	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pelaksana PUAP Tidak Berjalan Dengan Baik Ditinjau dari Sisi Pemerintah dan Petani Pelaksana	Faktor-Faktor Penyebab Pelaksanaan PUAP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditinjau dari Sisi Pemerintah</li> <li>• Ditinjau dari Sisi Petani Pelaksana</li> <li>• Sintesis</li> </ul>	Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Data berupain formasi-informasi yang telah terkumpul dikaitkan dengan fakta-fakta danteori-teori yang ada dan selanjutnya dianalisis serta disintesis.	Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PUAP yang dikaitkan dengan indicator keberhasilan, dapat disimpulkan bahwa program PUAP belum berjalan secara efektif. Ketidak efektifan ini berasal dari duasisi, yaitu sisi pemerintah sebagai pihak perencana dan pengawas, serta masyarakat sebagai sasaran program.

Ilham Yosmiardi	2009	Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) dalam Rangka Mengurangi Kemiskinan Dan Pengangguran (Studi Pelaksanaan Permentan Nomor : 16/Permentan/Ot.140/2/2008 Tentang Pedoman Puap Di Kabupaten Magetan)	Efektifitas program PUAP dipengaruhi 3 (Tiga) aspek, yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspek Kelembagaan</li> <li>• Aspek Pelaksanaan Usaha dan Kegiatan</li> <li>• Aspek Masyarakat.</li> </ul>	Jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.	Diperoleh hasil bahwa efektifitas program PUAP sudah dapat berjalan secara efektif. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PUAP: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Faktor Penunjang pelaksanaan program PUAP, yaitu Keadaan geografis Kabupaten Magetan, Adanya kesiapan Tim Teknis baik untuk kelancaran penyusunan Rencana Usaha Bersama dan Adanya kerjasama antara Penyuluh Pendamping, Pengurus Gapoktan, Penyelia Mitra Tani (PMT)</li> <li>2) Faktor Penghambat pelaksanaan program PUAP, yaitu dalam pelaksanaan PUAP bantuan dana yang diberikan belum sebanding dengan jumlah anggota kelompok tani, Pencairan dana dari pusat tidak sesuai dengan rencana.</li> </ol>
O'engAnwarudin	2009	Pengembangan Kelembagaan, Partisipasi dan Kemandirian Kelompok Tani dalam Usaha Agribisnis Perdesaan Di Kecamatan Banjaran, Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kelompok tani (X1)</li> <li>• pengembangan gabungan kelompok tani (X2)</li> <li>• partisipasipetani (X3)</li> <li>• kemandirian kelompok tani (X4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ujivaliditas</li> <li>• reliabilitas instrument</li> </ul> Teknik analisis data <ul style="list-style-type: none"> <li>• analisis jalur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• X1 dan X2 berpengaruh secara bersama-sama terhadap X3</li> <li>• X1, X2 dan X3 berpengaruh secara bersama-sama terhadap X4</li> <li>• Pengaruh langsung X1 terhadap X3, X2 terhadap X3, X1 terhadap X4, X2 terhadap X4, dan X3 terhadap X4</li> <li>• Seluruhnya signifikan</li> <li>• Pengaruh tidak langsung</li> </ul>

		Majalengka, Jawa Barat			X1 terhadap X3 melalui X2 X1 terhadap X4 melalui X2 dan melalui X3 X2 terhadap X4 melalui X1 dan melalui X3 X3 terhadap X4 melalui X1 dan melalui X2.
EkaSetyono	2011	Analisis faktor yang mempengaruhi pemberian dana PUAP terhadap petani di Kabupaten Boyolali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat penghasilan (X1)</li> <li>• Luas tanah (X2)</li> <li>• personal (X3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• analisis regresi linier berganda</li> <li>• Uji t</li> <li>• Uji F</li> <li>• Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• X1, X2, X3 berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian dana PUAP</li> <li>• personal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian dana PUAP</li> <li>• variabel luas tanah yang paling dominan berpengaruh terhadap pemberian dana PUAP</li> </ul>
Desak Made Diah Wijayanti	2011	Jiwa Kewirausahaan Pengurus Gapoktan, Penerapan Manajemen Agribisnis dan Keberhasilan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jiwa kewirausahaan</li> <li>• penerapan manajemen</li> <li>• tingkat keberhasilan PUAP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menganalisis hubungan metode deskriptif, metode Korelasi Rank Spearman</li> <li>• menganalisis pengaruh metode Regresi Linier Berganda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jiwa kewirausahaan pengurus Gapoktan dan Penerapan manajemen agribisnis oleh pengurus Gapoktan termasuk dalam katagori baik</li> <li>• Keberhasilan program PUAP di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung termasuk dalam katagori cukup berhasil</li> <li>• Terdapat hubungan nyata antara jiwa kewirausahaan pengurus Gapoktan dengan kinerja keberhasilan PUAP</li> <li>• Terdapat hubungan sangat nyata antara penerapan manajemen agribisnis dengan kinerja keberhasilan PUAP.</li> </ul>

<p>Erizal Jamal (Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 25 No.2)</p>	<p>2008</p>	<p>Kajian Kritis Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Di Indonesia</p>	<p>Kajian ini menelaah tentang pendekatan yang digunakan Departemen Pertanian dalam pembangunan perdesaan melalui pendekatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)</p>	<p>Hasil maksimal yang mungkin dapat diharapkan dan pelaksanaan program ini adalah sebagai <i>entry point</i> dan perekat seluruh program Departemen Pertanian dalam pembangunan perdesaan. Selain itu ke depannya diperlukan adanya suatu <i>grand strategi</i> pembangunan dalam beberapa kurun waktu perencanaan.</p>
--	-------------	--	---	--

## 2.9. Kerangka Berpikir

Penjelasan alur penelitian ini dapat digambarkan dalam *Roodmap* pada **Gambar 3**. Berdasarkan studi kasus di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sukoharjo, maka pada penelitian ini akan menganalisa pelaksanaan program PUAP di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sukoharjo yaitu dengan melihat sejauh mana kinerja Gapoktan PUAP dalam membentuk LKMA. Oleh karena itu untuk mengetahui kinerja Gapoktan PUAP tersebut, maka perlu mengetahui profil dari masing-masing Gapoktan PUAP, dengan cara memotret dapat mengetahui gambaran perbedaan dari masing-masing Gapoktan PUAP. Metode digunakan untuk memotret profil Gapoktan PUAP yaitu analisis deskriptif kualitatif, sehingga dapat dijelaskan mengenai gambaran profil dari masing-masing Gapoktan PUAP tersebut.

Setelah menganalisa profil Gapoktann PUAP, kemudian menganalisa faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan program PUAP yang dilihat dari aspek pendanaan, aspek manajemen kinerja, aspek proses pendampingan, aspek regulasi, dan aspek lingkungan. Metode digunakan untuk menganalisa faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan program PUAP yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan analisa profil Gapoktan PUAP, dan faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan program PUAP, maka perlu adanya suatu strategi alternatif PUAP yang dapat membantu Gapoktan PUAP dalam membentuk LKMA yang tangguh. Pada penelitian ini dalam penyusunan strategi alternatif PUAP melibatkan *key person* yang berkompeten, dengan melakukan pendekatan melalui wawancara mendalam dan *Focus Group Discussinin* (FGD) oleh *key person*, hasil FGD tersebut kemudian di analisis menggunakan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP), sehingga diharapkan hasil diperoleh dari analisis AHP tersebut dapat diperoleh langkah prioritas yang tepat dalam membantu pencapaian tujuan program PUAP dengan terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang tangguh.